

PERANAN PERILAKU PIMPINAN PARTAI POLITIK TERHADAP KEMAJUAN PARTAINYA

Oleh : **Salasiah**

Dosen Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

A party system is called solid and adaptable, if it is able to absorb and unite all the new social forces that arise as a result of modernization. From this point of view, the number of parties will only be important if it affects the capacity of the system to establish the institutional channels necessary to accommodate political participation.

The purpose of this study is to find out how the Golkar Party holds consistency to reject the Perppu Pilkada according to the National Conference of Jakarta which is contrary to the attitude of the Chairman of the Golkar Party DPP. Inconsistent attitude Ical responded to the DPP Golkar Party's results Munas in Jakarta, Ace Hasan Syadzily, who then asked all cadres for level I and II to no longer believe in Ical and assume Ical has denied the confidence of participants in the event that Bali asked Ical refuse Perppu Pilkada.

In this case we can imagine how Golkar will be managed over the next five years if party policy easily changes without the correct organizational mechanism. Ical underestimated the aspirations of Golkar officials who have supported him in Bali.

The researcher suggests that the party must be consistent and what is decided in the National Congress must be obeyed and executed. With strong character, the Golkar Party will be solid. On the contrary if it is not consistent or mencla-mencle then the party becomes fragile and dissolved. Holding the principle for the party is a law of nature means that if strong holds commitment he will be glorious and respected.

Keywords: Political party, Consistency

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya aspirasi-aspirasi politik baru dalam suatu masyarakat, yang disertai dengan kebutuhan terhadap partisipasi politik lebih besar, dengan sendirinya menuntut pelembagaan sejumlah saluran baru, diantaranya melalui pembentukan partai politik baru. Tetapi pengalaman di beberapa negara dunia ketiga menunjukkan, pembentukan partai baru tidak akan banyak bermanfaat, kalau sistem kepartaiannya sendiri tidak ikut diperbaharui.

Suatu sistem kepartaian baru disebut kokoh dan adaptabel, kalau ia mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik. Sistem kepartaian yang kokoh, sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok-kelompok baru ke dalam sistem politik.

1. Definisi Partai Politik

Partai politik yaitu organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Sedangkan definisi partai politik menurut ilmuwan politik yaitu:

- 1) Friedrich : partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan tersebut akan memberikan kegunaan materil dan idil kepada para anggotanya.
- 2) Soltau : partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat. Tujuan dari pembentukan partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusional – untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka

2. Fungsi Partai Politik

Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya.

Partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan kepentingan masyarakat (interest

aggregation) dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur (interest articulation). Rumusan ini dibuat sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa atau usulan kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan kebijakan umum yang diterapkan pada masyarakat.

Partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat. Sosialisasi politik mencakup juga proses menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan, partai politik berusaha menciptakan image (citra) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.

Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Di tengah masyarakat terjadi berbagai perbedaan pendapat, partai politik berupaya untuk mengatasinya. Namun, semestinya hal ini dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi atau partai itu sendiri melainkan untuk kepentingan umum.

3. Tujuan Pembentukan Partai Politik

Tujuan dari pembentukan partai politik menurut Undang-undang no.2 tahun 2008 tentang partai politik, yaitu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik Indonesia mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu ada juga tujuan partai politik menurut basis sosial dibagi menjadi empat tipe yaitu :

- Partai politik berdasarkan lapisan masyarakat yaitu bawah, menengah dan lapisan atas.
- Partai politik berdasarkan kepentingan tertentu yaitu petani, buruh dan pengusaha.
- Partai politik yang didasarkan pemeluk agama tertentu.
- Partai politik yang didasarkan pada kelompok budaya tertentu.

Dari latar belakang di atas maka peneliti ingin meneliti tentang prinsip berpolitik yang santun.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah , " Bagaimana Partai Golongan Karya memegang konsistensi untuk menolak Perppu Pilkada sesuai Munas Jakarta yang bertentangan dengan sikap Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical versi Munas IX di Bali melalui twiternya, yang memutuskan dan mendukung Perppu Pilkada di anggap sikap tidak konsisten ?"

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui Bagaimana Partai Golongan Karya memegang konsistensi untuk menolak Perppu Pilkada sesuai Munas Jakarta yang bertentangan dengan sikap Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical versi Munas IX di Bali melalui twiternya, yang memutuskan dan mendukung Perppu Pilkada di anggap sikap tidak konsisten .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah bahwa secara teoritis adalah untuk memperdalam ilmu Administrasi Negara pada umumnya dan Ilmu Politik pada khususnya .Secara praktek bahwa sebagai masukan kepada parpol untuk konsistensi dalam berpartaipolitik sangat mendasar.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Perilaku Pimpinan Partai Politik

1. Pengertian Perilaku Manusia

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003) . Menurut Skinner , seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003) , merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme , dan kemudian organisme tersebut merespons , maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus – Organisme – Respon.

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi

Faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku manusia .(1).Genetika ,(2).Sikap – adalah suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu,(3)Norma sosial – adalah pengaruh tekanan sosial,(4)Kontrol perilaku pribadi – adalah kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan suatu perilaku.

B. Pemimpin

Menurut Ridwan, (10/06/2009) kata pemimpin dan pimpinan adalah dua kata yang seakan sama, namun memiliki dua makna yang berbeda. Ketika kita disuguhkan tentang pertanyaan manakah yang lebih baik maknanya, maka kemungkinan kita akan terlihat bingung untuk menentukan isinya.Berbicara mengenai pemimpin atau pimpinan sudah barang tentu memiliki bawahan atau ada sesuatu yang di bawahnya, namun dalam segi pemahamannya maka akan berbeda jauh. Ketika kita bicara pemimpin maka akan tercipta sebuah stereotip yang sebenarnya harus berbeda dengan makna pimpinan.Pimpinan memiliki pemahaman bahwa ia harus memimpin berdasarkan pengangkatan, dalam artian suka atau tidak suka bawahannya ia tetap menjadi orang yang memimpin suatu jabatan. Makna pemimpin adalah ia memimpin berdasarkan pengakuan oleh bawahan, dalam artian memang yang pantas memimpin.

Lalu apa hubungannya kita membahas pemahaman itu? dan apa konteksnya dengan kebangsaan? ada, dan ternyata ini adalah salah satu hal yang membuat kita tak bisa bangkit dari "keterpurukan". Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki wilayah yang besar dan memiliki keragaman budaya yang begitu besar. Bahkan saat ini sedang diperjuangkan untuk menjadi catatan dunia bahwa bangsa ini memiliki kebudayaan terbanyak di dunia. Maka tak ayal lagi, kita pun sebenarnya harus segera sesadar mungkin untuk lakukan perubahan yang berarti bagi kemajuan bangsa. Berbicara pemimpin dan pimpinan, kita akan kembali kepada konteks "pendewasaan" peradaban. Dalam artian, tidak mudah menghasilkan pemimpin jika dibandingkan dengan pimpinan. Seorang pimpinan entah itu memang "capable" atau tidak, mau tidak mau harus memimpin karena ia diangkat meski terkadang tidak memiliki jiwa pemimpin. Namun seorang pemimpin itu memang layak untuk di cari dan diperjuangkan. Mari kita coba berfikir sama-sama, apakah memang sudah banyak pemimpin di negeri ini, mari kita perhatikan hadits Rasulullah saw ini:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabann ya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabann ya. Seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta majikannya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Berbicara pimpinan bisa siapa saja untuk memimpin, namun yang harus kita kritisi adalah apakah memang dia pantas jadi pimpinan atau apa benar ia memiliki jiwa pemimpin? sebenarnya yang harus kita cari adalah pemimpin yakni orang-orang yang bertanggungjawab dengan segala kesadarannya untuk menjaga amanah yang diberikan kepadanya, yang berani mengambil resiko untuk kepentingan umum meski dirinya sendiri harus menderita. Kondisi bangsa saat ini adalah krisis pemimpin dan bukan krisis pimpinan. Untuk menjadi pemimpin dibutuhkan waktu yang lama karena memakan proses, jika dibaratkan seperti emas yang terbenam dalm lumpur yang pekat maka harus segera di bersihkan agar memang ia terlihat sebagai barang yang berharga. Proses-proses menuju pemunculan pemimpin-pemimpin bangsa ini yang terkadang tidak jalan, betapa tidak banyak orang yang memang mau untuk lakukan itu. Kita memang dijadikan untuk menjadi pemimpin seperti yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, namun pada kehidupannya kita cenderung lupa bahwa kita itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban akan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia. Pemimpin itu harus melakukan islah di muka bumi agar pengakuan kita terhadap Allah seperti yang tertuang dalam surah Al-A'raf ayat 172 mengenai kesaksian kita terhadap Allah sebagai Rabb menjadi benar-benar terealisasi. Bangsa ini sedang butuh pemimpin yang memang sesuai dengan pemahaman yang sama yakni akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada kata-kata lagi yang harus dikedepankan selain, masiuhkan kita harus menunggu dipimpin oleh pimpinan yang bukan memiliki jiwa pemimpin? kita harus sama-sama bangkit dari keterpurukan dengan sadar bahwa kita itu pemimpin.

Syaikh Sayyid Quthub memberikan pemahaman bahwa seseorang akan meninggal jika rizkinya memang telah habis dan tugasnya telah selesai. Tugasnya telah selesai berarti kembali kepada pemahaman bahwa kita harus berusaha merdeka sesuai tafsiran surat Al-Imran ayat 110 yakni sebuah makna kemerdekaan yakni merdeka untuk menyatakan pendapat (amar ma'ruf), kemerdekaan untuk mengkritik yang salah (nahi munkar) dan kemerdekaan untuk beriman kepada Allah (Tafsir Al Azhar). Seorang pemimpin harus berani

tegakan amar ma'ruf nahi munkar dan menerima untuk dikritik, seorang pemimpin tidak akan berani berkata saya capek saya mau istirahat ketika memang belum terasa keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.

Dan pemimpin itu tidak akan menjual keadilan hanya untuk kepentingan dirinya karena ia sadar bahwa *Yasytaruna bi ayatil-lahi tsamanan qalila*, sehingga meski emas sebesar dunia ini diberikan ia tidak akan goyah untuk takut melakukan amar ma'ruf nahi munkar.

Pemimpin itu harus menjadi pendengar setia dan penjaga keadilan untuk kesejahteraan rakyatnya sehingga rakyat menjadi merasa tenang dan melakukan yang terbaik karena memang mereka ikhlas dipimpin. (Ridwan,2009)

C. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Menurut Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum Parpol adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun.

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Parpol disini berfungsi untuk menyerap, menghimpun (mengolah, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan.

Contoh: Misal di lingkungan sekolah, OSIS itu ibarat Parpol. Jika ada aspirasi ataupun masalah yang dituntut siswa, misalnya perbaikan fasilitas sekolah. Pada saat itu terjadi interaksi antara siswa dan OSIS membahas mengenai kurangnya fasilitas sekolah. Selanjutnya OSIS menyampaikan aspirasi/tuntutan siswa tadi kepada pihak sekolah. Interaksi antara siswa (masyarakat), OSIS (parpol) dan pihak sekolah (pemerintah), merupakan suatu komunikasi. OSIS sebagai suatu sarana komunikasi antara pihak siswa dan pihak sekolah. Dalam kehidupan politik suatu negara contoh tadi dapat diibaratkan para siswa itu masyarakat, OSIS itu Parpol, dan pihak sekolah itu Pemerintah.

2.Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisasi yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. Dengan demikian, diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum.

Contoh: penyampaian program politik parpol pada acara kampanye menjelang pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi parpol sebagai sarana sosialisasi politik.

3. Parpol sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam istem politik ataupun pemerintahan. Atau dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu jabatan ataupun beberapa jabatan politik ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang. Rekrutmen politik gunanya untuk mencari otang yang berbakat aatupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

Contoh: misal seperti pada contoh komuikasi politik tadi, dilingkungan sekolah. OSIS akan mengganti ketua dan anggotanya karena masa jabatannya sudah habis. Nah proses OSIS tersebut dalam mencari ketua dan anggota OSIS baru merupakan suatu proses rekrutmen. Entah itu melalui penunjukan dan penyeleksian ataupun melalui pemilihan. Sama hal nya dengan Papol, parpol akan mencari, menyeleksi, dan mengangkat suatu anggota baru untuk menduduki suatu jabatan partai atau di pemerintahan, ataupun untuk mewakili dalam pemilu.

4. Parpol sebagai saran pengatur konflik

Pengatur konflik adalah mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pengendalian konflik ini dilakukan dengan cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat(DPR/DPRD/Camat)untuk mendapatkan keputusan politik mengenai permasalahan tadi.

Contoh: di dalam masyarakat terjadi masalah mengenai naiknya harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak terjadi demo menentang kebijakan tersebut. Dalam kasus ini parpol sebagai salah satu perwakilan dalam masyarakat di badan perwakilan rakyat (DPR/DPRD), mengadakan dialog bersama masyarakat mengenai kenaikan harga BBM tersebut. Parpol dalam hal ini berfungsi sebagai mengendalikan konflik dengan cara menyampaikan kepada pemerintah guna mendapatkan suatu putusan yang bijak mengenai kenaikan harga BBM tersebut.

D. Sejarah Terbentuknya Partai Politik

1. Perkembangan partai politik Di Dunia

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam perkembangannya kemudian partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis, yang mewakili aspirasi rakyat.

Pada permulaannya peranan partai politik di negara-negara Barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis.

Perkembangan selanjutnya adalah dari Barat, partai politik mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu di Asia dan Afrika. Partai politik di negara-negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Hal ini terjadi di Indonesia (waktu itu masih Hindia Belanda) serta India. Dan dalam perkembangannya akhir-akhir ini partai politik umumnya diterima sebagai suatu lembaga penting terutama di negara-negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu negara.

2. Perkembangan Partai Politik

Perkembangan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu : Masa penjajahan Belanda, Masa pedudukan Jepang dan masa merdeka.(1).Masa penjajahan Belanda.Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat , gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini.

Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islami) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh,(2).Masa pendudukan Jepang,pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial, (3).Masa Merdeka (mulai 1945).

Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai.Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin.Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan

PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama melalui G 30 S/PKI akhir September 1965). Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI. Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hingga pada pemilu 1997. Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbang rezim Suharto, maka pemilu dengan sistem multi partai terus berlanjut hingga pemilu saat ini.

3. Potret Partai Politik Masa Kini

Ideologi bagi partai adalah suatu idealisme yang menjadi garis besar bagi kegiatan dan organisasi partai. Bisa jadi karena identitas yang kurang kuat inilah, partai Indonesia secara umum masih mencari jati dirinya. Sangat sulit membedakan partai-partai Indonesia—selain dengan mengelompokkan mereka dalam kelompok partai agamis dan sekuler. Dari segi ini pun terkadang ada partai yang terlihat berusaha menggabungkan kedua unsur ini. Partai Amanat Nasional, misalnya, berusaha menggabungkan citra nasionalisnya dengan kedekatannya terhadap Muhammadiyah. Lemahnya ideologi bahkan bisa dilihat dalam partai-partai utama. Partai besar, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pun masih amat bergantung pada karisma Mbak Mega (Megawati Soekarnoputri) untuk menarik pendukung. Padahal, demi kelangsungan organisasinya, partai ini seharusnya sudah bisa “mengalihkan” dukungan terhadap pemimpin menjadi dukungan terhadap identitas dan organisasi partai. Dilihat dari kacamata organisasi fisik, partai-partai kita juga masih sangat lemah. Di tingkat masyarakat, hanya partai-partai besar yang mampu terus eksis di luar masa kampanye dan pemilu. Kebanyakan partai masih “tidur” kalau tidak ada pemilu, dan cabang-cabang mereka juga tutup. Kemampuan untuk tetap aktif sangat bergantung pada kapasitas cabang partai dan komitmen pemimpin di tingkat lokal. Lagi pula, cabang lokal juga sangat bergantung pada ketersediaan dana untuk tetap mengadakan aktivitas. Sebagian besar partai juga masih mengontrak kantor cabangnya, dan hanya partai Orde Baru yang punya kantor tetap. Walaupun, kalau mereka sulit mendapat kontrakan, aktivitas juga terhenti dan partai menjadi vakum. Dengan kapasitas organisasi yang seperti ini, sangat sulit bagi partai politik Indonesia membangun hubungan yang stabil dengan para pendukung dan anggotanya. Dari segi rekrutmen, partai-partai besar biasanya hanya mengandalkan pada suara yang didapat pada pemungutan suara sebelumnya. Partai-partai seperti PDIP dan Golkar kurang mementingkan rekrutmen dan lebih menggantungkan diri pada popularitas partainya saat pemilu. Adapun partai-partai muda, seperti PKS dan PAN, memang memprioritaskan rekrutmen anggota baru, tetapi kemampuan mereka untuk merekrut sangatlah berbeda. PKS terlihat lebih mampu untuk konsisten menjalankan program rekrutmen, sedangkan PAN tertatih-tatih untuk mempertahankan eksistensinya di tingkat lokal. Hanya dengan komitmen para kadernya, cabang PAN dapat tetap bertahan tetapi

aktivitasnya sangat terbatas. Dengan manajemen anggota yang semacam ini, tidaklah mengherankan bahwa partai biasanya mengejar produk “jadi” dari selebritas sebagai calon anggota legislatif mereka. Memang tren ini menandakan ketidakmampuan dan kemalasan partai untuk mendidik dan memupuk kadernya sendiri. Tapi bisa juga ini karena kegagalan partai untuk berkembang pada masa lalu, dan pada masa reformasi ini pun mereka juga masih dalam tahap awal perkembangannya. Terutama bagi partai muda, belum ada kader yang siap maju.

Jadi, yang diperlukan oleh partai politik bukan hanya dukungan, tapi juga kesabaran memilih untuk memberikan kesempatan kepada partai politik pilihan mereka. Perjalanan partai politik Indonesia ke arah kemajuan masihlah panjang. Selagi kita belajar tentang demokrasi selama kurang-lebih sepuluh tahun terakhir, partai politik kita juga sedang belajar tentang organisasi dan manajemen. Godaan dan tantangan tentu saja banyak dan sangat mudah bagi partai politik untuk menjadi non-aktif dan kembali ke praktek politik uang. Karena itulah partisipasi pemilih sangatlah penting untuk menyeleksi partai politik yang kurang efisien. Pemilihan Umum 2009 nanti adalah ujian penting bagi kematangan, bukan hanya bagi partai politik, tapi juga bagi pemilih dalam menentukan pilihannya. (Andhika Kusuma Wardhana, 2016).

E. Organisasi

1. Pengertian Organisasi Menurut Para Ahli

Ada beberapa para ahli yang mengemukakan tentang pengertian organisasi, antara lain:

1). W.J.S. Poerwadarminta

Organisasi merupakan susunan dan aturan dari berbagai bagian (orang atau kelompok) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan tertata.

2). Janu Murdiyamoko & Citra Handayani

Organisasi merupakan sebuah sistem sosial yang mempunyai identitas kolektif secara tegas, progja yang jelas, prosedur dan cara kerja, serta daftar anggota yang secara terperinci.

III. PEMBAHASAN

Perubahan sikap Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical versi Munas IX di Bali melalui twiternya, yang memutuskan dan mendukung Perppu Pilkada di anggap sikap tidak konsisten. Ical seakan di tentang teman politiknya di internal, termasuk kubunya sendiri. Adalah Ketua DPP Partai Golkar kubu Ical, Nurul Arifin yang seakan membantah pernyataan Ketua Umumnya sendiri.

Selasa (2/12/15) malam, Ical berkicau melalui akun twiternya, @aburizalbakrie tentang adanya kesepakatan KMP dan Demokrat untuk mendukung Perppu Pilkada. Ia juga mendeklarasikan perubahan sikap partainya yang awalnya menolak Perppu Pilkada, kini mendukung. Penolakan Perppu yang menurutnya sebenarnya menjadi rekomendasi Munas Golkar di Bali pada 30 November – 4 Desember lalu.

Namun Ical mengatakan, karena aspirasi masyarakat menguat mendukung Perppu Pilkada ini maka Golkar pun mengikuti. Nurul kemudian memastikan saat ini partainya, Golkar tetap berjuang agar Perppu Pilkada ditolak, sesuai rekomendasi Munas Bali. Golkar terikat dalam nota kesepahaman dalam perppu Pilkada, namun rekomendasi Munas meminta untuk memperjuangkan.

Memperjuangkan itu bisa berhasil atau tidak bisa berhasil atau bisa tidak. Itu nanti di DPR, kata nurul diplomatis kemarin. Nurul memastikan kembali, fraksi partainya di DPR akan berjuang agar Perppu Pilkada tidak disahkan sehingga kembali pada Pilkada lewat DPRD. Namun apabila Perppu itu disahkan, maka Golkar juga bisa menerima hal tersebut.

Kita jalankan mandatnya Munas tapi bagi Golkar, kalau Perppu disahkan pun tidak masalah, ucapnya. Nurul menolak anggapan bahwa Ical mencla – mencla, cari aman. Menurutnya aspirasi peserta Munas Bali tidak bisa dihalang – halangi dan itu bukan merupakan keinginan pribadi Ical. Enggak ya. Kita tidak bisa mengatakan itu keinginan Pak Ical, itu muncul dari floor kan tidak bisa menolak, kata nurul.

Sikap tidak konsisten Ical ditanggapi kubu DPP Partai Golkar hasil Munas di Jakarta. Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta Ace Hasan Syadzily, kemudian meminta kepada seluruh kader untuk tingkat I dan II untuk tidak lagi percaya kepada Ical dan menganggap Ical telah mengingkari kepercayaan peserta acara di Bali yang meminta Ical menolak Perppu Pilkada.

Dari kasus ini kita bisa membayangkan bagaimana Golkar akan dikelola selama lima tahun ke depan jika kebijakan partai dengan mudah berubah – ubah tanpa mekanisme organisasi yang benar. Ical menyepelkan aspirasi para pengurus Golkar yang telah mendukungnya di Bali. Seharusnya perjanjian KMP tidak lebih tinggi dari hasil acara yang mereka sebut Munas, sindir Ace.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjawab diplomatis saat ditanya terkait perubahan sikap Ical dari sebelumnya. SBY kemudian berharap DPR dapat menerima Perppu yang ia keluarkan saat masih menjabat sebagai Presiden. Saya mengajak semua parpol dan tokoh politik, berjuang untuk rakyat.

Rakyat suka Pilkada langsung dengan 10 perbaikan, mari kita wujudkan. Semoga DPR bisa menerima untuk rakyat semua kata SBY. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengomentari diplomatis sikap Ical. Sudah bagus itu, kata JK sambil mengumbar senyum. Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul, pun ikut mencibir Ical. Ruhut menyebut ical sedang menjilat ludahnya sendiri. Bagus, Pak Aburizal (Ical) menjilat ludahnya kembali, ha – ha – ha, kata Ruhut Sitompul tertawa lepas.

Menurut Ruhut, keputusan Aburizal yang menolak Perppu Pilkada terlalu terburu – buru. Aburizal kata dia, hanya mementikan kehendak peserta Munas dan tidak mendengarkan suara masyarakat yang menginginkan Pilkada tetap diselenggarakan secara langsung. Pak Aburizal kemarin telmi, telat mikir. Harusnya jangan lawan kehendak rakyat. Kalau pak SBY itu cerdas, santun, bersih, tapi dia berani bilang Golkar Penghianat, sindir Ruhut.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap tidak konsisten Ical ditanggapi kubu DPP Partai Golkar hasil Munas di Jakarta. Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta Ace Hasan Syadzily, kemudian meminta kepada seluruh kader untuk tingkat I dan II untuk tidak lagi percaya kepada Ical dan menganggap Ical telah mengingkari kepercayaan peserta acara di Bali yang meminta Ical menolak Perppu Pilkada. Dari kasus ini kita bisa membayangkan bagaimana Golkar akan dikelola selama lima tahun ke depan jika kebijakan partai dengan mudah berubah – ubah tanpa mekanisme organisasi yang benar.

Ical menyepelkan aspirasi para pengurus Golkar yang telah mendukungnya di Bali. Seharusnya perjanjian KMP tidak lebih tinggi dari hasil acara yang mereka sebut Munas, sindir Ace.

B.Saran-saran

Peneliti menyarankan bahwa partai harus konsisten dan apa yang diputuskan di Musyawarah Nasional harus ditaati dan dijalankan. Dengan sifat yang kokoh maka Partai Golongan Karya akan solid. Sebaliknya bila tidak konsisten atau mencla-mencle maka partai tersebut menjadi rapuh dan bubar. Memegang prinsip bagi partai adalah hukum alam artinya bila kuat memegang komitmen ia akan jaya dan disegani.

DAFTAR PUSTAKA

Andhika Kusuma Wardhana ,2016 , Gogle

Murdiyatomoko & Handayani, 2004, *Sosiologi 1*, Grafindo Media Pratama, Jakarta.

Surat Kabar Harian KaltimPost, 2016, Partai Golkar menerima Perpu Pilkada , Jakarta.

Surat Kabar Harian Tribun Kaltim, 2016, Partai Golkar tentang Perpu Pilkada , Jakarta.

Surah Al-Bakharah ayat 30

Surah Al-A'raf ayat 172

Undang–undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

W.J.S. Poerwadarminta, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.